

**TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA – USAHA PEMERINTAH
DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL
DI INDONESIA TAHUN 1959-1965**

(Skripsi)

**Oleh
SUGESTI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRAK

TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA – USAHA PEMERINTAH DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 1959-1965

Oleh

Sugesti

Pada tahun 1950-1959 di Indonesia diberlakukan sistem demokrasi liberal. Yang melandasi sistem prakteknya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil dari masing-masing partai yang akan duduk di DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum untuk parlemen diselenggarakan tanggal 29 September, untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Dewan Konstituante yang dibentuk pada tahun 1955 bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun usaha-usaha yang dilakukan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang duduk di dewan ini lebih memperjuangkan kepentingan partainya sendiri-sendiri daripada kepentingan bersama bangsa Indonesia. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden. Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah Apa sajakah Usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dalam rangka Demokrasi terpimpin maka usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965 yaitu membentuk Kabinet, membentuk MPRS dan DPAS, menetapkan GBHN, membentuk Front Nasional, dan membentuk DPR-GR.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965 yaitu membentuk Kabinet, membentuk MPRS dan DPAS, menetapkan GBHN, membentuk Front Nasional, dan membentuk DPR-GR. Yang dengan pelaksanaan program kerja dari Kabinet Kerja dan ditunjukannya keberhasilan dan berfungsinya lembaga-lembaga seperti MPRS, DPAS dan DPR-GR dalam tugasnya hal ini membuat situasi pemerintah dan ketahanan nasional di Indonesia semakin mantap.

**TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA – USAHA PEMERINTAH
DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL
DI INDONESIA TAHUN 1959-1965**

**Oleh
SUGESTI**

Skripsi

Sebagai Salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA-
USAHA PEMERINTAH DALAM
MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL
DI INDONESIA TAHUN 1959-1965**

Nama Mahasiswa : Sugesti
No. Pokok Mahasiswa : 0743033040
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Tontowi Amsia M.Si.
NIP. 19590902 198703 1 001

Drs. Maskun, M.H.
NIP. 19591228 198503 1 005

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

Drs. Buchori Asyik, M.Si.
NIP. 19560108 198503 1 002

Drs. Maskun, M.H.
NIP. 19591228 198503 1 005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Tontowi Amsia, M.Si.**

Sekretaris : **Drs. Maskun, M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Drs. Syaiful M, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Bujang Rahman, M.Si

NIP. 19600315 198503 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Sugesti
NPM : 0743033040
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/ Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP
Alamat : Jln. Inpres Sumbersari Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan

Dengan ini, menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini, dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Januari 2012

Sugesti

NPM. 0743033040

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Desa Sumbersari Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan pada tanggal 16 Januari 1989 sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Samidi dan Ibu Sri Utami.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, tamat pada tahun 2001.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, tamat pada tahun 2004.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, tamat pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur Non Reguler. Dan pada tahun 2011 penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) SMP N 1 Natar.

MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Qs. Al-Insyirâh; 6-8)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati

penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Ibu dan Bapakku tercinta (Samidi dan Sri Utami) yang telah membesarkan, mendidik dan tak henti-hentinya berdoa untuk keberhasilanku. Aku akan terus berjuang untuk kebahagiaan ibu dan bapak,

Kakak ku satu-satunya Titin Sundari dan Keponakan ku Farelin yang selalu ada untuk ku dan selalu menjadi motivasi dan semangat bagiku untuk meraih kesuksesan.

Suami ku tercinta Prada. Edho Fitriansyah terima kasih selalu mendukung dan memotifasiku dalam hidup ku ini dan telah memberi ku hal terindah dalam hidup ku.

Para pendidik

Almamater tercinta

SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA – USAHA PEMERINTAH DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 1959-1965**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan studi, dimana dalam proses penyelesaiannya penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Unila
2. Bapak Dr.M Thoha B.S Jaya, M.S. selaku Pembantu Dekan I FKIP Unila
3. Bapak Drs.Arwin Ahmad, M.Si., selaku Pembantu Dekan II FKIP Unila
4. Bapak Drs.Iskandar Syah, M.H. selaku Pembantu Dekan III FKIP Unila
5. Bapak Drs.Buchori Asyik, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila.
6. Bapak Drs. Maskun, M.H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unila, dan juga selaku pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Drs. H. Tontowi Amsia, M.Si. selaku pembimbing pertama sekaligus Pembimbing Akademik, yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Drs. Syaiful, M.Si. selaku dosen pembahas utama. Terimakasih atas kesediaanya menjadi dosen pembahas utama dalam ujian skripsi dan memberi masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Ibu Dra. Risma M. Sinaga, M.Hum, Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd, M.Hum, Bapak Drs. Syaiful, M.Si, Bapak Drs. Wakidi, M.Hum, Bapak M. Basri, S.Pd, M.Pd, dan Bapak Suparman Arif, S.Pd, M.Pd, serta para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada penulis.
10. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu ku tercinta yang selalu memberikan doanya demi keberhasilanku. Aku akan melanjutkan perjuangan ini. Bapak, Ibu percayalah, suatu saat aku akan membuat kalian bangga.
11. Kakak, Kakak Ipar ku dan Keponakan ku tersayang, Titin Sundari, Sutrisno dan Farelin terima kasih untuk semuanya dukungannya.
12. Suamiku tercinta Prada. Edho Fitriansyah terima kasih walaupun engkau sedang ada dalam tugas jauh disana engkau selalu mendukung, memperhatikan dan memberikan ku semangat.
13. Calon anakku yang sedang ada dalam kandungan ku bunda ucapkan terima kasih telah mengerti bunda dan selalu menemani bunda dalam mewujudkan cita-cita bunda. Bunda sangat Mencintaimu melebihi apapun didunia ini.

14. Buat Sahabat-sahabat ku Devi, Evi, Mbak Endah. Diaz dan Iin Muchlinda yang telah terlebih dahulu mewujudkan cita-citanya terima kasih atas canda, tawa dan kebersamaan kita selama ini. Semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai kapan pun.
15. Teman-teman pendidikan sejarah Angkatan 07 Non Reguler, Desri, Erni, Nuraini, Riska, Yanti, Teteh Fara, Tia, Nunuk, Utami, Okta, Anis, Uni Ceria, Iska, Merita, Rina, April, Fajar, Wahyu, Ari, Dwi, Kustono, Nurapriyadi, Fahmi, Veki, Fera dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, dan pengorbanan kalian semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga selamanya.
16. Teman-teman pendidikan sejarah Angkatan 07 Reguler, Gris, Dila, Era, Ria, Siro, Apri, Defti, Ina, Meli, Ardi, Aan, Koko, Fournine, Bang Togar, Juli, Yogi dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih kebersamaan ini akan tetap terjaga selamanya.
17. Kakak Tingkat 06 MbakDesna, Mbak Putri, Mbak Wina, dan adik-adik tingkat di Pendidikan Sejarah 08,09,10,11 dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
18. Teman-teman PPL ku di SMP N I Natar, Cuy, Iska, Arif, Riyaldi, Mbak Merli, Mbak Firda, Mbak Friska, Dwi, Uli dan Feni, terima kasih atas suka, canda dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama PPL.
19. Segenap pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kita semua.

Penulis sangat menyadari keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan informasi yang ada pada diri penulis, sehingga skripsi ini masih perlu penyempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu penulis dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2012

Penulis

Sugesti

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Analisis Masalah Rumusan Masalah	4
C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian Tujuan Penelitian	5
Kegunaan Penelitian	5
Ruang Lingkup Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	7
Konsep Tinjauan Historis	7
Konsep Pemerintah.....	9
Konsep Ketahanan Nasional.....	11
B. Kerangka Pikir.....	15
C. Paradigma.....	17
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode yang Digunakan.....	18
Metode Historis.....	18
B. Variabel Penelitian	20
C. Teknik Pengumpulan Data	21
Teknik Kepustakaan	21
Teknik Dokumentasi	22
Teknik Analisis Data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	
1. Situasi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal.....	25
2. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.....	28
3. Usaha-Usaha Pemerintan Di Bidang Kelembagaan Dalam Memantapkan Ketahanan Nasional Di Indonesia Tahun 1959-1965	30
3.1 Pembentukan Kabinet Kerja	31
3.1.1 Pembentukan Kabinet Kerja I.....	31
3.1.2 Pembentukan Kabinet Kerja II.....	34

3.1.3 Pembentukan Kabinet Kerja III	36
3.1.4 Pembentukan Kabinet Kerja IV	38
3.1.5 Pembentukan Kabinet Dwi Kora	41
3.2 Pembentukan MPRS dan DPAS	42
3.3 Penetapan GBHN	43
3.4 Pembentukan Front Nasional	44
3.5 Pembentukan DPR-GR	46

B. Pembahasan

1. Usaha-Usaha Pemerintah Dalam Mempertahankan Dasar Negara Di Bidang Kelembagaan Terhadap Situasi Politik Di Indonesia Untuk Memantapkan Ketahanan Nasional Tahun 1959-1965	48
1.1 Pembentukan Kabinet Kerja	48
1.2 Pembentukan MPRS dan DPAS	51
1.3 Penetapan GBHN	51
1.4 Pembentukan Front Nasional	52
1.5 Pembentukan DPR-GR	53

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	54
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Mahasiswa
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Research/ Penelitian
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. Susunan dan Komposisi Menteri Dalam Kabinet Kerja I.....
6. Susunan dan Komposisi Menteri Dalam Kabinet Kerja II.....
7. Susunan dan Komposisi Menteri Dalam Kabinet Kerja III
8. Susunan dan Komposisi Menteri Dalam Kabinet Kerja IV
9. Susunan dan Komposisi Menteri Dalam Kabinet Dwi Kora
10. Peraturan Presiden No.7 Tahun 1959
11. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959
12. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960
13. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959
14. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960.....

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1950-1959 di Indonesia diberlakukan sistem demokrasi liberal. Yang melandasi sistem prakteknya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang secara resmi mulai berlaku setelah disyahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 15 Agustus 1950.

Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil dari masing-masing partai yang akan duduk di DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum untuk parlemen diselenggarakan tanggal 29 September, untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Dewan Konstituante yang dibentuk pada tahun 1955 bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun usaha-usaha yang dilakukan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang duduk di dewan ini lebih memperjuangkan kepentingan partainya sendiri-sendiri daripada kepentingan bersama bangsa Indonesia.

Seperti yang dikemukakan Bibit Suprpto bahwa :

- a. Golongan Islam yang menghendaki Dasar Negara Islam.

- b. Golongan Nasionalis yang menghendaki Dasar Negara Pancasila.
 - c. Golongan Komunis yang menghendaki Dasar Negara Komunis.
- (Bibit Suprpto, 1985 ; 200)

Sulitnya untuk menyatukan pendapat ketiga kelompok atau tiga golongan ini menyebabkan Dewan Konstituante didalam sidangnya untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Dengan keadaan seperti ini pemerintah mulai berfikir untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Sukarno dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di muka sidang Konstituante mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945.

(Bibit Suprpto, 1985 ; 200)

Dalam menanggapi saran dari Presiden Sukarno ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Untuk itu perlu diadakan musyawarah didalam Dewan Konstituante untuk mencapai kata mufakat. Namun cara ini tidak mendapat hasil juga, sehingga cara yang harus ditempuh berikutnya yaitu dengan cara pemungutan suara, juga mengalami kegagalan. Keadaan ini bertambah sulit akibat adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan beberapa daerah yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa pemerintah melalaikan kewajibannya membangun daerah.

Perbedaan yang tajam diantara Dewan Konstituante tersebut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai sangat membahayakan kelangsungan negara.

Untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, maka pimpinan Tentara Nasional (TNI) menyarankan kepada Presiden agar memberlakukan

kembali UUD 45 karena UUD'45 dianggap dapat mengatasi segala macam kericuhan dalam negeri pada waktu itu.(Nugroho Notosusanto, 1985 ; 3)

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden. Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. (Frans S. Fernandes, 1988 ; 149).

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini sebagai realisasi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka Presiden Sukarno dalam bidang kelembagaan membentuk Kabinet kerja, MPRS dan DPAS, GBHN, DPR-GR, dan Front Nasional yang sesuai dengan kemurnian Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam Pembentukan Kabinet Kerja atau baru yang presidentil yaitu kabinet yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet baru ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dalam Kabinet Kerja I ini sebagai Perdana menteri adalah Presiden Sukarno sendiri. Dengan demikian Kabinet Kerja I ini Presiden Sukarno selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian Presiden Sukarno juga membentuk Front Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden no. 13 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959. Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-

cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. (Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 316).

Setelah itu Presiden Sukarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960. Tugas DPR-GR ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Sukarno pada saat upacara pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 yaitu “melaksanakan Manipol, Merealisasikan amnat Penderitaan Rakyat, dan Melaksanakan Demokrasi Terpimpin”. (Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 313)

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas kembali inti permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan suatu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apasajakah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965?.

C. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya tentang usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah diatas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan peneliti mencakup :

1. Objek Penelitian :Usaha-usaha di bidang kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
2. Subjek Penelitian :Pemerintah Dalam Memantapkan Ketahanan Nasional Di Indonesia Tahun 1959-1965
3. Tempat Penelitian :Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung
4. Waktu Penelitian :Tahun 2011
5. Bidang Ilmu :Sejarah

REFERENSI

Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia. Ghalia Indonesia* : Jakarta. Halaman 200.

Notosusanto, Nugroho.1985. *Tercapainya Konsesus Nasional*. Balai Pustaka : Jakarta. Halaman 3.

Fernandes, Frans S. 1988. *Hubungan Internasional Dan Peran Bangsa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* : Jakarta. Halaman 149.

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 316.

Op.cit. Halaman 313.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologi konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Tinjauan berasal dari kata tinjau yang bearti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan”. Sedangkan kata Historis berasal dari bahasa Yunani “Istoria” yang bearti ilmu yang biasanya diperuntukan bagi penelaah mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Menurut definisi yang paling umum, kata History kini bearti “ masa lampau umat manusia”. Sedangkan Sejarah menurut bahasa Jerman adalah geschichte yang berasal dari geschehen yang bearti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata Historis dikenal dengan kata sejarah. Adapun pengertian Historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa :

Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta dengan kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan serta arah program masa depan.

(Roeslan Abdulgani, dalam H. Rustam E. Tamburaka. 1999 : 12)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya. dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. dengan demikian tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis) dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberikan pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam mempelajari sejarah ada beberapa manfaat dan kegunaannya menurut H. Rustam E. Tamburaka ada beberapa tujuan dan manfaat dengan mempelajari sejarah yaitu :

1. Untuk memperoleh pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa sejarah dimasa lampau baik positif maupun pengalaman negatif dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi.
2. untuk mengetahui dan menguasai hukum-hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat memanfaatkan dan menerapkan bagi persoalan-persoalan hidup saat sekarang dan yang akan datang.
3. untuk menumbuhkan kedewasaan berfikir, memiliki vision atau cara pandang kedepan yang lebih luas serta bertindak lebih arif dan bijaksana terutama dalam mengambil keputusan.

(H. Rustam E. Tamburaka, 2009 : 9-10)

Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, kegunaan pelajaran sejarah ada tiga yaitu:

1. Memberi pelajaran (edukatif) bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman dimasa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal yang buruk dapat dihindari.
2. memberi ilham (inspiratif) bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa dimasa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekara. Peristiwa-peristiwa yang besar akan memberi ilham yang besar pula.
3. memberi kesenangan (rekreatif) bahwa kita bisa terpesona oleh kisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona dengan kisah yang baik, sebaaimana kita bisa terpesona dengan sebuah roman yang bagus dengan sedihnya kita bisa berhasil mengangkat seni.

(Nugroho Notosusanto, 1984 : 17)

Jadi berdasarkan beberapa konsep diatas, perlu dikemukakan juga bahwa manfaat mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengetahui peristiwa masa lampau yang dijadikan manusia yang menjadi inspirasi dan pedoman untuk melakukan tindakan yang bijaksana pada masa sekarang dan yang akan datang.

Konsep Usaha Pemerintah

Usaha dapat diartikan sebagai daya upaya atau ikhtiar, kegiatan, perbuatan, dan lain-lain untuk mencapai, melaksanakan, menyempurnakan sesuatu yang di inginkan atau di cita-citakan.

Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata pemerintah itu berarti:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Maka dalam arti yang luas, usaha pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, usaha pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

Tujuan pemerintahan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga seperti MPR dan DPR yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu Negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang

perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministry.

Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa:

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat Demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan didalam Negara berada ditangan rakyat. (Winarno:2007:87)

Secara normatis sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi bukan ajaran ototarian atau totalitarian. nilai-nilai mluhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

Berdasarkan fokus dari penelitian ini maka sesuai dengan usaha yang coba diketengahkan adalah mengenai usaha pemerintah di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional. Pemerintah Indonesia pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap menggantikan UUDS .

Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung atau tidak langsung membahayakan integritas identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional. (Tontowi, 2008 : 53)

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan nasional yang harus diisi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita itu kita tidak boleh lepas dari bidang Hankam. Kalau kita membiarkan mengenai pertahanan keamanan sepertinya selalu identik dengan pengamanan ancaman, gangguan hambatan dan tantangan yang ada dan dapat menghambat pembangunan, baik yang sudah terlihat hasilnya ataupun hasil kerja kita seperti yang terjadi pada masa orde lama. Dimana pada saat itu ancaman gangguan yang timbul seperti PKI, PRRI, DI TII, Permesta dan masalah Irian Barat sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus selalu menuju ke tujuan yang ingin kita capai dan secara efektif dielakan hambata-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul

baik dari luar maupun dari dalam , perlu dipupuk terus menerus. Ketahanan Nasional yang timbul dan meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Menurut Winarno dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga prespektif atau sudut pandang terhadap konsepsi Ketahanan Nasional. Ketiga prespektif tersebut sebagai berikut :

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Prespektif ini melihat Ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.
2. Ketahanan Nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan Ketahanan Nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat pembangunan maupun pemecahan masalah kehidupan.
3. Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi Khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep Ketahanan Nasional dimaksukan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara menerima dan menjalankannya.
(Winarno 2007 : 170-171)

Ketahanan Nasional meliputi :

1. Ketahanan di bidang ideologi yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri.
2. Ketahanan di bidang politik yang mutlak diperlukan untuk membina stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan aktif dan tanggung jawab.

3. Ketahanan di bidang ekonomi yang harus diusahakan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
4. Ketahanan di bidang sosial budaya dengan mengembangkan rasa senasib sepenanggungan serta keselarasan keserasian dan keseimbangan sosial.
5. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan, dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa dengan kekuatan bersenjata sebagai pelopor.
(Tontowi, 2008 : 76)

Gagasan tentang Ketahanan Nasional bermula pada tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komonisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Fenomena tersebut mempengaruhi para pemikir militer di SSKAD.

Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaya, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang, Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur persatuan dan kesatuan serta kekuatan nasional.

Konsepsi Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu Ketahanan Nasional mempunyai fungsi sebagai sistem kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional serta mempunyai

kedudukan sebagai kondisi, doktrin, dan metode memecahkan masalah-masalah nasional.

Karena konsepsi Ketahanan Nasional berlandaskan, menjabarkan dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, maka pola pikir dalam melaksanakan fungsi dan kedudukan Ketahanan Nasional adalah menggunakan pola pikir kesisteman.

Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi adalah tidak lain merupakan hasil pembangunan nasional, yaitu keterpaduan dari hasil pembangunan segenap aspek kehidupan nasional atau astagatra. Oleh karena itu keberhasilan meningkatkan Ketahanan Nasional pada suatu saat, merupakan cerminan keberhasilan secara keseluruhan aspek kehidupan nasional pada saat itu, dan apabila hal ini diproyeksikan lebih lanjut, dapat diartikan bahwa peningkatan Ketahanan Nasional merupakan hasil upaya segenap warga negara Indonesia dibidang masing-masing pada segenap aspek nasional.

B. Kerangka Pikir

Kegagalan Dewan Konstituante dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri mengancam kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetasi keadaan yang demikian Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang memuat tiga hal pokok yaitu :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.

2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung dari mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUDS.
3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta Pembentukan Dewan pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (Nugroho Notosusanto, 1983 ; 102)

Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin

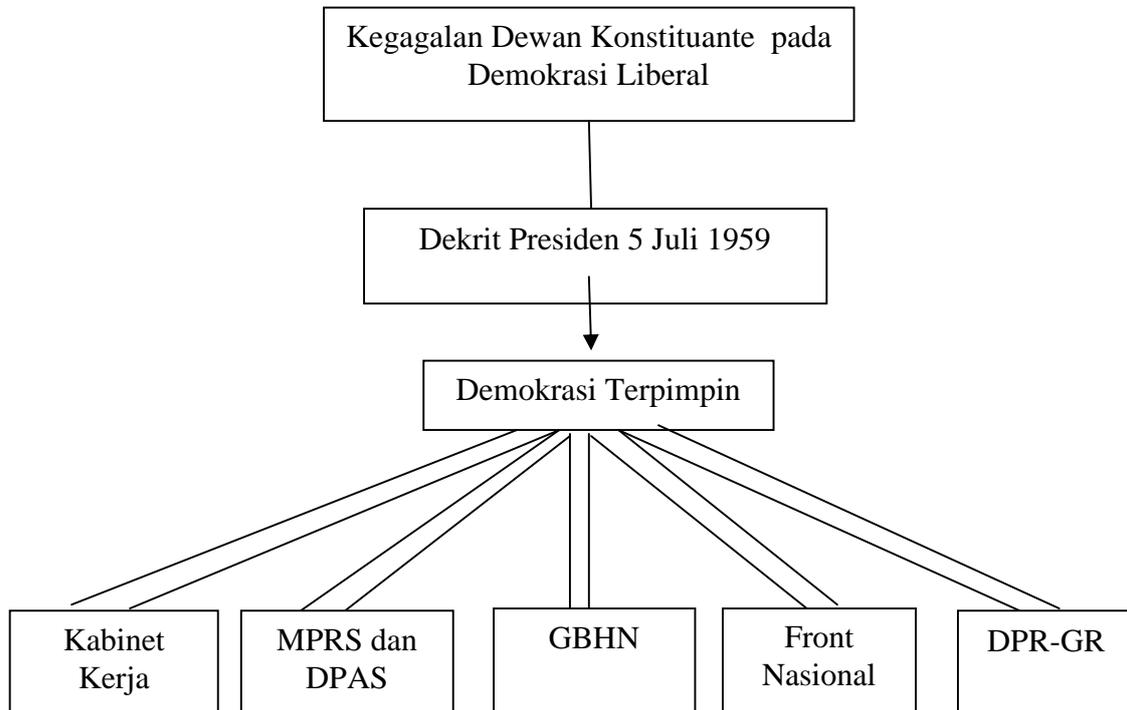
Dalam Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno melakukan beberapa tindakan untuk mengembalikan keutuhan dasar negara Indonesia antara lain dengan mengajukan konsep :

1. Membentuk Kabinet Gotong Royong (Kabinet Kerja) Yang dilanjutkan dengan Kabinet Dwi Kora.
2. Pembentukan MPRS dan DPAS
3. Penetapan GBHN
4. Membentuk Front Nasional
5. Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).

Usaha- usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang kelembagaan tersebut membuat situasi dan kondisi di Indonesia semakin membaik dan Ketahanan Nasional Indonesia yang pada masa Demokrasi Liberal mengalami gangguan mengalami kemantapan pada masa Demokrasi terpimpin.

C. Paradigma

D.



- Keterangan :
- : Garis Akibat
 - : Garis Pelaksanaan
 - ===== : Garis Kegiatan

REFERENSI

Tamburaka, Rustam E dan Roeslan Abdul Gani. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan IPTEK*. PT.Rineka Cipta : Jakarta. Halaman 12.

Op. cit. Halaman 9-10.

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Inti Dayu: Jakarta. Halaman 17.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara: Jakarta. Halaman 87.

Amsia, Tontowi. 2008. *Perspektif Kewiraan dalam Ketahanan Nasional*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Halaman 53.

Winarno. 2007. *Op. cit.* Halaman 170-171.

Amsia, Tontowi. 2008. *Op. cit.* Halaman 76.

Notosusanto, Nugroho. 1983. *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan : Jakarta. Halaman 102.

III.METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian, metode merupakan faktor penting untuk memecahkan masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut Winarno Surahmad, metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu. (Winarno Surahmad, 1982; 121).

Sedangkan menurut Husin Sayuti menegaskan bahwa metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Husin Sayuti, 1989; 32).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara kerja yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

A. Metode yang digunakan

Metode Historis

Menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.

Menurut Prof. DR. H. Hadari Nawawi, mengatakan bahwa:

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian

atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. (Hadari Nawawi, 1985 ; 79)

Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas, maka metode historis adalah suatu cara dalam proses mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data-data historis, serta diinterpretasikan secara kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah untuk merekonstruksi fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan metode historis adalah:

1. Heuristik, yakni kegiatan menyusun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik sejarah, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isi.
3. Inteprestasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.
4. Historiografi, menyimpulkan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. (Nugroho Notosusanto, 1984; 84)

Berdasarkan langkah-langkah penelitian histories seperti di atas, maka langkah-langkah kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah :

1. Heuristik : Peneliti mencoba mencari serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2. Kritik : Setelah data terkumpul, kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat untuk menguji apakah data tersebut valid atau tidak serta layak menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan. Jenis kritik yang dilakukan dengan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah mengkritik

dengan melihat apakah data yang didapat itu asli atau palsu. Kritik intern adalah mengkritik yang bertujuan untuk meneliti kebenaran isi data dari sumber data yang sudah didapat.

3. Interpretasi : Peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah didapatkannya dan selanjutnya berusaha untuk melakukan analisis data atau peneliti mulai melakukan pembentukan konsep dan generalisasi sejarah.
4. Historiografi : Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyusunan atau penulisan dalam bentuk laporan hingga menjadi sebuah konsep sejarah yang sistematis.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, maka metode histories adalah suatu cara dalam mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data-data histories, serta diinterpretasikan secara kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah untuk merekonstruksi fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah merupakan konsep dari gejala yang bervariasi yaitu objek penelitian. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

(Ari Kunto, 1989; 78).

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang dapat bersumber dari

kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian. (Hadari Nawawi, 1985 ; 55).

Variabel adalah obyek penelitian/atribut, atau apa yang menjadi variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan variabel tunggal usaha-usaha pemerintah bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan lebih akurat. Teknik pendukung dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Teknik Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan, misalnya koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. (Koentjaraningrat, 1997; 8).

Menurut pendapat lain teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Nawawi, 1985; 133).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dalam usaha untuk memperoleh beberapa teori maupun argumen yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan masalah yang diteliti.

Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (Nawawi, 1985; 134).

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 1993; 188).

Jadi, dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan buku-buku, surat kabar, dan film dokumenter yang terbit pada masa sekitar Demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah pada saat itu khususnya usaha-usaha pemerintah bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Teknik Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu data yang berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang

dikumpulkan dalam bentuk laporan dan karangan para sejarawan sehingga memerlukan pemikiran dalam menyelesaikan masalah penelitian.

Langkah–langkah dalam menganalisis data dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, selanjutnya adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, kategori dan disusun secara sistematis. Proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung. Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga interpretasi bisa ditarik. Data yang direduksi akan memberikan gambaran mengenai hasil pengamatan yang mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penampilan data sekumpulan data yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari pengambilan tindakan.

Bentuk penyajiannya antara lain dengan cara memasukkan data ke dalam sejumlah matrik, grafik, dan bagan yang diinginkan atau bisa juga hanya dalam bentuk naratif saja.

3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi

Setelah data direduksi, dimasukkan ke dalam bentuk bagan, matrik, dan grafik, maka tindak lanjut peneliti adalah mencari konfigurasi yang mungkin menjelaskan

alur sebab akibat dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung.

Langkah–langkah yang akan dilakukan peneliti dalam mengambil kesimpulan adalah :

1. Menyusun data-data dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari sumber yang didapat di lapangan.
2. Setelah semua data diseleksi barulah ditarik kesimpulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penulisan.

REFERENSI

Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung. Halaman 121.

Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar metodologi Riset*. Fajar Agung: Jakarta. Halaman 32.

Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada university Press : Yogyakarta. Halaman 79.

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Inti Dayu: Jakarta. Halaman 84.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta : Jakarta. Halaman 78.

Nawawi, Hadari. 1985. *Op. cit.* Halaman 55.

Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta. Halaman 8.

Nawawi, Hadari. 1985. *Op. cit.* Halaman133.

Op. cit. Halaman 134.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Op. cit.* Halaman 188.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Situasi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat resmi di bubarkan dan Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum RIS dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno telah menandatangani rancangan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara.

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Seperti yang dikemukakan Nugroho Notosusanto :

Pemimpin-pemimpin Indonesia dari generasi yang pernah memimpin pergerakan Nasional, memperoleh pendidikan politiknya dari Belanda. Tidaklah mengherankan, bahwa mereka menganggap sudah sewajarnya jika Indonesia Merdeka juga memakai sistem demokrasi parlementer Belanda yang liberal.
(Nugroho Notosusanto, 1983 : 120-121).

Sesuai dengan kehidupan Demokrasi Liberal, rakyat diberi kebebasan membentuk partai politik. Untuk itu pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Maklumat berisi pembentukan partai-partai politik. Sejak itulah muncul berbagai partai seperti PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSII, Partindo dan Parlindo. Sementara itu, sistem pemerintahan parlementer berarti Presiden hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, sedangkan fungsi kepala

pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Jadi dalam sistem ini, aspirasi rakyat disalurkan melalui partai-partai politik yang memiliki wakilnya dalam parlemen.

Sistem Demokrasi Liberal ternyata belum menguntungkan bagi negara Indonesia. Persaingan antar golongan atau antar partai politik tidak dapat terelakan. Partai yang memperoleh suara dalam pemilu akan berkuasa dalam pemerintahan. Sebaliknya partai yang kalah berupaya mencari kesalahan pemerintahan yang sedang berkuasa supaya dapat dijatuhkan. Demokrasi Parlementer atau Liberal yang meniru sistem parlementer model Eropa Barat tidak sesuai dengan kondisi politik dan perilaku rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai semangat proklamasi dan pasal-pasal yang mencerminkan kelima nilai dasar bangsa Indonesia, kiranya lebih sesuai.

Hal ini menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto :

Instabilitas dibidang politik disebabkan karena aturan permainan atau rules of the game bagi percaturan politik liberalisme dilaksanakan tanpa menghayati institusi-institusi yang melandasinya. Sebaliknya institusi yang benar-benar hidup di masyarakat kita, institusi-institusi yang didasarkan atas sistem kekeluargaan yang sekarang kita kenali dengan sebutan sistem Pancasila, tidak memperoleh wadahnya didalam sistem politik yang diberlakukan pada waktu itu. Karena itu terdapat suasana instabilitas politik. (Nugroho Notosusanto, 1983 ; 63).

Instabilitas politik pada Demokrasi Liberal ini dapat dibuktikan dengan silih bergantinya atau sering terjadinya pergantian kabinet. Secara berturut-turut seperti Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953) dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-1955).

Pada tahun 1955 di Indonesia untuk pertama kali diadakan pemilihan umum. dengan pemilu dimaksudkan kondisi politik dan kehidupan demokrasi menjadi lebih baik. Pemilihan umum diadakan dua kali, yang pertama diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di DPR. Sedangkan pemilihan umum yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Dewan Konstituante sebagai panitia atau dewan penyusun Undang-Undang Dasar.

Pemilihan umum tahun 1955 yang diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terjadi ketika itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang sudah lama terbina kini mulai mengalami keretakan. Perkembangan yang membahayakan dikalangan TNI telah diupayakan agar permasalahannya tidak berlarut-larut. Akan tetapi akibat pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 telah memperhebat kekecewaan dan kebencian daerah-daerah di luar Jawa, terutama Sumatera, terhadap pemerintah pusat dan khususnya terhadap Presiden Sukarno. Hal ini menyebabkan pemberontakan Dewan Daerah (Militer) dan pemberontakan PRRI.

Untuk mengatasi keadaan serba sulit setelah pemilihan umum tahun 1955, Presiden Sukarno mengajukan suatu gagasan tanpa sepengetahuan kabinet pada tanggal 21 Februari 1957 dihadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Konsepsi Presiden.

Isi pokok dari Konsepsi Presiden itu ialah :

1. Sistem Demokrasi Parlemerter secara barat tidak sesuai lagi dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan Demokrasi terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong yang anggota-anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan pertimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini mengetengahkan pula pembentukan "Kabinet Kaki Empat" yang mengandung arti bahwa empat partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, harus turut serta didalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional.
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada Kabinet, baik diminta maupun tidak diminta.
(Nugroho Notosusanto, 1983 ; 76).

Dari pokok Konsepsi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi atau situasi yang ada dan segera dibentuk sistem demokrasi yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Liberal yang tidak sesuai dilaksanakan di Indonesia.

2. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia situasi politik tidak menguntungkan untuk kelangsungan hidup suatu negara. Hali ini disebabkan karena adanya persaingan antara partai-partai politik. Melihat keadaan yang serba tidak stabil itu rakyat merasa tidak puas. Mereka telah lama mendambakan

keadaan Indonesia yang tentram dan pembangunan yang baik. Tumpuan harapan itu sebenarnya dipercayakan kepada Dewan Konstituante hasil pemilihan umum 1955. Tetapi kenyataannya, Dewan Konstituante tidak dapat memenuhi harapan rakyat. Dewan Konstituante gagal menyusun UUD yang baru. Melihat kenyataan itu mulai timbul pendapat untuk kembali ke UUD 1945 . Presiden Sukarno juga mengamanatkan agar Dewan Konstituante menetapkan kembali berlakunya UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam pidatonya didepan sidang Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Menanggapi anjuran Presiden itu, Konstituante sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menentukan sikap atau memutuskan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara diadakan tiga kali. Hasilnya ialah suara yang setuju selalu lebih banyak daripada suara yang menolak kembali ke UUD 1945, tetapi kurang dari dua mayoritas pertiga dari yang diperlukan. Dengan demikian, keadaan politik masih tetap tidak menentu. Kegagalan Dewan Konstituante mengambil keputusan menerima anjuran pemerintah masih menunjukkan bahwa partai-partai politik masih mengabdikan kepada kepentingan partainya saja.

Keadaan yang demikian itu dipandang oleh Presiden Sukarno sebagai keadaan yang kritis. Keadaan ketatanegaraan Indonesia berada pada tahap yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah sebabnya, demi keselamatan bangsa dan negara maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menstabilkan situasi politik yang terjadi saat itu.

Presiden Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu diucapkan pada hari Minggu sekitar pukul 17:00 WIB pada suatu upacara resmi di Istana Negara.

Isi pokok Dekrit Presiden itu ialah :

Pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD '45 dan pemakluman pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD '45.

(G. Moedjanto 1989 : 114)

Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden itu berarti UUDS tidak berlaku lagi dan bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka roda Demokrasi terpinpin dan dwifungsi ABRI menemukan landasannya untuk mulai berputar.

3. Usaha-Usaha Pemerintah Di Bidang Kelembagaan Dalam Memantapkan Ketahanan Nasional Di Indonesia Tahun 1959-1965.

Demokrasi terpinpin semula dimaksudkan untuk menentang pengaruh liberal dalam demokrasi barat yang bertentangan dengan asas-asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pancasila. Tapi dalam pelaksanaannya, pimpinan diberi hak untuk mengambil suatu keputusan bilamana tidak tercapai persesuaian sehingga menjurus kearah diktator yang menyimpang dari kemurnian Pancasila. Adapun tujuan dari pelaksanaan Demokrasi terpinpin adalah untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia karena pada masa demokrasi liberal sering sekali instabilitas politik. Berlakunya kembali UUD 45 dalam rangka

Demokrasi terpimpin, disambut dengan penuh harapan oleh rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik. (Nugroho Notosusanto, 1983 ; 102) .

Sedangkan pendukung dari Demokrasi Terpimpin adalah partai politik dan golongan.

Untuk mengadakan pembaruan struktur politik, dikemukakan bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin harus didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat, yang anggotanya terdiri dari partai politik dan golongan.

(Nugroho Notosusanto, 1983 ; 98).

Usaha-usaha yang diambil oleh Presiden Sukarno atau pemerintah dalam mempertahankan Dasar Negara di bidang kelembagaan dalam pelaksanaan Demokrasi terpimpin adalah:

3.1 Pembentukan Kabinet Kerja

3.1.1 Pembentukan Kabinet Kerja I

Setelah Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya, Presiden Sukarno kemudian membentuk kabinet baru yang presidentil yaitu kabinet yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kabinet baru ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 berdasarkan surat keputusan Presiden No. 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959.

Dalam Kabinet Kerja I sebagai Perdana Menterinya adalah Presiden Sukarno sendiri. Dengan demikian dalam Kabinet Kerja ini Presiden Sukarno sebagai

kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kabinet Kerja I dibentuk berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pembuka Demokrasi Terpimpin, yang komposisi personalnya sebagai berikut :

I. Pimpinan Kabinet :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Perdana Menteri | : Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI |
| 2. Menteri pertama | : Ir. H. Djuanda |
| 3. Wakil Menteri Pertama | : Dr. J Leimena |

II. Menteri-Menteri Kabinet inti untuk :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Keamanan Pertahanan | : Jenderal A.H Nasution |
| 2. Keuangan | : Ir. Djuanda |
| 3. Distribusi | : Dr. J Leimena |
| 4. Pembangunan | : Dr. Khaerul Saleh |
| 5. Produksi | : Kolonel Suprayogi |
| 6. Kesejahteraan Rakyat | : H. Mulyadi Joyomartono |
| 7. Luar Negeri | : Dr. Subandrio |
| 8. Dalam Negeri | : Ipik gondomono |
| 9. Sosial Kultural | : Prof. Mr. Muh. Yamin |

(Bibit Suprpto, 1985 ; 207)

Walaupun demikian menteri-menteri yang duduk dalam Kabinet I ini masih banyak yang berasal dari Kabinet Djuanda . Kabinet Kerja I mempunyai tiga program yaitu :

1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik.

Dalam memperingati hari Proklamasi ke empat belas tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno berpidato dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato ini kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia

(Manipol), yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan program Kabinet I .

Sementara itu Presiden Sukarno menilai bahwa sistem Demokrasi Liberal dengan ditandainya banyak partai-partai politik di Indonesia. Dengan sistem banyak partai dirasa tidak cocok lagi dilaksanakan di Indonesia, karena hanya akan membuat persaingan-persaingan antar partai politik dan membuat mereka melalaikan kewajiban membangun negara. Adapun senjata yang dipergunakan Presiden Sukarno untuk melumpuhkan partai-partai tersebut adalah Penpres No. 7 tahun 1959.

Dalam Penpres No 7 tahun 1959 dalam bagian diktum dan penjelasannya ditentukan bahwa Maklumat Perintah 3 November 1945 dinyatakan tidak berlaku, karena dianggap berdirinya banyak partai politik ternyata tidak berhasil menciptakan Stabilitas Politik, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa, bangsa dan merintang pembanguan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
(Bambang Sunggono, 1992 ; 80)

Untuk melanjutkan penyerdehanaan partai-partai politik tersebut memberlakukan Keputusan Presiden tentang eksistensi partai politik antara lain :

- a. Keppres No. 200 tahun 1960 telah membubarkan partai masyumi termasuk bagian-bagian, cabang-cabang dan ranting-rantingnya diseluruh wilayah Indonesia.
- b. Keppres No. 201 tahun 1960 telah membubarkan partai sosialis Indonesia (PSI), termasuk bagian-bagian, cabang-cabang dan ranting-rantingnya diseluruh wilayah Indonesia.
(Bambang Sunggono, 1992 ; 80)

3.1.2 Pembentukan Kabinet Kerja II

Kabinet Kerja II ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21/1960 tertanggal 18 Februari 1960. Dalam Kabinet Kerja II sebagai Perdana Menteri tetap Presiden Sukarno sendiri seperti halnya dalam Kabinet Kerja I yang merupakan kabinet pertama pada masa Demokrasi Terpimpin.

Program Kabinet Kerja II ini sangat sederhana yaitu melanjutkan atau meneruskan Program Kabinet Kerja I :

1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik.

Untuk melaksanakan program tersebut mengalami kesulitan karena mendapat hambatan dan tantangan yang cukup berat, karena masih ada pemberontakan-pemberontakan.

Pemberontakan-pemberontakan di Indonesia masih terus berkecamuk, belum juga ditindas secara tuntas, DI/TII masih terus saja bergerak. PRRI Permesta masih belum selesai ditangani dan belum juga menyerah. Ketambahan lagi timbulnya peristiwa jengkol yang merupakan aksi sepihak PKI di dewan Jengkol di Kabupaten Kediri.
(Bibit Suprpto, 1985 ; 219).

Pada mulanya untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan itu ditempuh melalui jalan diplomasi. Namun jalan Diplomasi tidak membuahkan hasil, maka cara yang harus ditempuh berikutnya yaitu dengan kekuatan militer.

Pada Kabinet Kerja II ini pemerintah melanjutkan kembali usaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena merupakan suatu tuntutan nasional. Tuntutan itu didasarkan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “ Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sedangkan Irian Barat adalah wilayah mutlak dari bangsa Indonesia. (Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto , 1984 ; 332).

Menanggapi sikap Belanda yang semakin sulit diajak berdamai dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, maka perjuangan pembebasan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer. Pada tanggal 19 Desember 1961 dalam rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Sukarno mengeluarkan Trikora (Tri Komando Rakyat yang berisi :

3. Gagalkan pembentukan negara boneka buatan kolonial Belanda.
 4. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
 5. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dang bangsa.
- (Tjahyadi Nugroho, 1985 ; 137)

Sebagai tindak lanjut penancangan program Trikora itu Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala ini bertugas melaksanakan isi Trikora. Melihat gerakan pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Operasi pembebasan Irian Barat akhirnya diketahui oleh dunia internasional. Ellsworth Bunker seorang Diplomat Amerika Serikat ditunjuk oleh Seketaris Jenderal PBB sebagai penengah. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara

pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York. Oleh karena itu, persetujuan ini lebih dikenal dengan perjanjian New York.

Adapun isi perjanjian New York itu sebagai berikut :

1. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962. Bendera Belanda diganti dengan Bendera PBB.
2. Pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan di bawah kekuasaan pemerintah sementara PBB (UNTEA).
3. Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.
4. Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962.
5. Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
(Tjahyadi Nugroho, 1985 : 141)

Sebagai pelaksanaan Perjanjian New York pada tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (PBB). Pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pemungutan pendapat rakyat (Pepera). Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nama Irian Barat selanjutnya diganti menjadi Irian Jaya.

3.1.3 Pembentukan Kabinet Kerja III

Kabinet Kerja II digantikan oleh Kabinet Kerja III berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 94. tahun 1962 tertanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet Kerja III nampaknya Presiden Sukarno berusaha melaksanakan Demokrasi Terpimpin serta berusaha memusatkan pemerintahan dibawah

kekuasaannya. Hal ini terlihat dengan menjadikan ketua lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara seperti menteri. Dengan demikian sangat jelas bahwa ketua lembaga tertinggi negara dan petinggi negara berada dibawah kekuasaannya, seperti yang dikemukakan oleh Bibit Suprpto sebagai berikut :

Perbedaan yang mencolok adalah bahwa sejak Kabinet Kerja III ini para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi Negara Yaitu MPRS dan Lembaga Tinggi Negara yaitu DPRGR, DPA, BPK. Mahkamah Agung dijadikan Menteri oleh Presiden baik Menteri inti maupun Menteri biasa. (Bibit Suprpto, 1985 ; 227).

Program Kabinet Kerja III meneruskan program Kabinet Kerja II. Di dalam masalah ekonomi Kabinet Kerja III dinilai kurang berhasil. Namun dalam bidang keamanan menunjukkan keberhasilan. Pada program kerja Kabinet III ini, dalam bidang keamanan ditandai dengan dilaksanakannya operasi pemulihan terhadap kaum pemberontak. Salah satunya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang dapat ditumpas melalui operasi keamanan yang intensif dan terpadu yang melibatkan unsur-unsur Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Pada tahun 1960 Menteri Keamanan Nasional (KSAD) mengadakan infeksi ke Sumatera Barat. Beliau disana memberikan seruan kepada kaum pemberontak agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa kita telah kembali kepada Undang – Undang Dasar 1945 dan perlu semua tenaga untuk bersatu lagi guna meneruskan perjuangan seperti semula.

(Dr. A. H. Nasution, 1984 ; 342)

Hal ini menunjukkan keberhasilan yaitu pada bulan April 1961, Ahmad Husein sebagai pimpinan PRRI mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno yang pada

pokoknya berisi pernyataan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dr. A. H. Nasution, 1984 ; 343)

Hal ini juga terjadi pada pemberontakan-pemberontakan lainnya seperti, Permesta dan DI/TII yang dapat berhasil ditumpas. Selain itu dimasa Kabinet Kerja III dalam usaha perjuangan pembebasan Irian Barat menunjukkan hasil yang gemilang. Sehingga cukup beralasan bagi Presiden Sukarno dalam pidato ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1962 diberi judul tahun kemenangan. Dalam pidatonya tersebut Presiden Sukarno mengemukakan “Tahun 1962 adalah tahun kemenangan, setidak-tidaknya tahun permulaan kemenangan. Merasa banggalah kita-kita ini anggota-anggota bangsa Indonesia”.(Presiden Sukarno, 1986 ; 78).

3.1.4 Pembentukan Kabinet Kerja IV

Dengan adanya regrouping kabinet pada tanggal 13 November 1963 maka berakhirilah Kabinet Kerja III yang kemudian diganti dengan Kabinet yang baru yaitu Kabinet Kerja IV.

Program Kabinet Kerja IV ini sedikit berbeda dengan program Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV ini mempunyai tiga program yaitu :

1. Sandang pangan
2. Pengganyangan Malaysia
3. Melanjutkan pembangunan

Program pengganyangan Malaysia ini dilatar belakangi oleh berdirinya Negara Malaysia yang meliputi Malaysia Barat, Kalimantan Utara, Sabah, Serawak yang kemudian disebut Malaysia Timur. Malaysia Timur inilah yang merupakan pokok pangkal sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Presiden Sukarno menganggap Federasi Malaysia merupakan neo-kolonialisme (Inggris), dan akan membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta :

1. Munculnya perjuangan rakyat di Kalimantan Utara yang dipelopori partai rakyat pimpinan A. M. Azahari.
2. Klaim Philipina atas wilayah Sabah, karena Sabah dahulu hanya disewakan oleh Sultan Sulu kepada Inggris. Sehingga Sabah harus dikembalikan kepada Philipina.

Rakyat di Jakarta yang menganggap Proklamasi Federasi Malaysia sebagai perwujudan “act of bad Faith” dari Tengku Abdul Rahman, mengadakan demonstrasi-demonstrasi yang dibalas pula oleh demonstrasi-demonstrasi besar terhadap Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, sehingga pada hari itu juga, 17 September 1963, hubungan diplomatik antara kedua negara putus.

(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto , 1984 ; 357).

Dalam usaha menyelesaikan masalah Indonesia dengan Malaysia telah dilakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri Indonesia, Filipina dan Malaysia

dari tanggal 5 sampai 10 Februari 1964. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil karena adanya perbedaan tafsiran :

1. Indonesia menghendaki agar gencatan senjata hanya berarti penghentian tembak-menembak.
2. Malaysia menghendaki agar penghentian tembak-menembak disusul dengan penarikan sukarelawan-sukarelawan Indonesia dari Kalimantan Utara.
(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notokusanto , 1984 ; 358).

Dalam sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, Partai Komunis Indonesia memanfaatkan situasi yaitu berusaha mengadakan pendekatan dan menarik perhatian Presiden Sukarno agar bersimpati terhadap Partai Komunis Indonesia. Sehingga dengan berbagai cara dilakukan oleh PKI. PKI membawa para anggotanya turun ke jalan-jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang Malaysia. (M.C Ricklefs, 1989; 414).

Setelah melalui perundingan tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia mengumandangkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta.

Isi Dwikora itu yakni :

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya. Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
3. Dwikora kemudian ditindak lanjuti dengan operasi militer dengan nama Komando Siaga.

3.1.5 Pembentukan Kabinet Dwi Kora

Dengan adanya reshuffle kabinet pada tanggal 27 Agustus 1964 melahirkan kabinet baru yaitu Kabinet Dwi Kora yang menggantikan Kabinet Kerja IV. Pada masa Kabinet Dwi Kora kedudukan Presiden Sukarno semakin kuat, hal ini terlihat dari beberapa komposisi kabinet yang tersusun pada waktu itu. Di dalam Kabinet Dwi Kora seorang Menteri bisa merangkap beberapa jabatan dalam kabinet. Perangkapan tersebut yaitu :

1. Dr. Subandrio merangkap sebagai : Waperdam I, Menko Kompartemen LN dan HELN.
2. Dr. Khaerul Saleh merangkap sebagai : Waperdam III, Ketua MPRS, Menko Kompartemen Pembangunan dan Menteri Minyak dan Gas Bumi.
3. Dr. J. Leimena merangkap sebagai : Waperdam II, Menko Kompartemen Distribusi.
4. K.H. Saiffudin Zuhri merangkap sebagai : Menko Kompartemen Agama dan Menteri Agama.
5. Mayjen Ali sadikin merangkap sebagai ; Menko Kompartemen Maritim dan Menteri Perhubungan Laut.
(Bibit Suprpto, 1985 ; 265).

Program Kabinet Dwi Kora adalah melanjutkan program Kabinet Kerja IV. Dalam usaha menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia dari pihak Angkatan Darat berusaha menempuh dengan jalan damai. Namun usaha ini gagal sebagai akibat adanya dokumen Gilchrist yang disebar oleh PKI. Di dalam surat tersebut tertulis kata-kata *our local Army friend*, yang memberi kesan seolah-olah ada kerja sama antara unsur-unsur TNI-AD dengan Inggris yang pada waktu itu dikategorikan sebagai salah satu kekuatan Nekomim.

(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994 ; 64).

3.2 Pembentukan MPRS dan DPAS

Sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebelum terbentuknya MPR yang tetap sesuai dengan UUD 1945 maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS). MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

Anggota-anggota MPRS itu ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan beberapa syarat, yaitu :

1. Setuju kembali kepada UUD 1945
2. Setia kepada perjuangan RI
3. Setuju dengan manifesto politik

Keanggotaan MPRS itu sendiri terdiri dari anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan. Anggota MPRS yang terbentuk waktu itu terdiri atas 261 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 wakil Golongan Karya. Dalam Penetapan Presiden itu ditegaskan tugas MPRS adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam sidang-sidang MPRS, telah menghasilkan beberapa ketetapan , resolusi, keputusan dan nota. Majelis masa Demokrasi Terpimpin dalam tiga kali sidang umum menghasilkan delapan ketetapan yaitu no I sampai VIII dengan perincian : dua ketetapan dalam sidang umum I, dua ketetapan dalam sidang umum ke II, dan empat ketetapan dalam sidang umum ke III.

Yang penting dalam ketetapan – ketetapan itu diantaranya ialah Ketetapan MPRS No I/MPRS/ 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN

dan Ketetapan No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip musyawarah dan mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga permusyawaratan, perwakilan. (Miriam Budiardjo. 1989 : 262.)

Presiden kemudian juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang lazim disebut Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Anggota DPAS berjumlah 45 orang. Mereka terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil Golongan karya dan 1 orang wakil ketua. DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Sebagai ketua DPAS adalah Presiden Sukarno dan wakil ketuanya, Ruslan Abdulgani. DPAS berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah sesuai dengan pasal 16 ayat 2 UUD 1945.

(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto , 1984 ; 358).

3.3 Penetapan GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959 saat memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke- 14, Presiden Sukarno mengucapkan pidato yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato ini kemudian dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol.

Intisari Manipol ada lima, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi terpimpin
4. Ekonomi terpimpin
5. Kepribadian Indonesia

Kelima intisari Manipol tersebut kemudian dikenal dengan USDEK. Selanjutnya DPAS mengusulkan agar pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959 tersebut dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usul DPAS tersebut diterima baik oleh presiden. Pada tanggal 10 November 1960 kemudian MPRS mengadakan sidang umum yang pertama di Bandung.

Dalam sidang di Bandung MPRS menerima dan mengukuhkan Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pengukuhan dilakukan dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang penetapan Manifesto Politik sebagai GBHN. Sidang MPRS juga memutuskan bahwa pidato Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul *Jalannya Revolusi Kita (Jarek)* dan pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB berjudul *To Build the World A New (Membangun Dunia Kembali)* menjadi pedoman pelaksanaan Manipol. Dan dengan adanya GBHN inilah yang merupakan perwujudan politik dan strategi nasional yang mencakup segala aspek kehidupan nasional, politik, ekonomi, sosbud dan pertahanan keamanan yang bertujuan Meningkatkan Ketahanan Nasional.

3.4 Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959. Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 316).

Menurut Peraturan Presiden tersebut, tujuan dari dibentuknya Front Nasional adalah :

1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia
2. Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional dan
3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tugas pokok dari Front Nasional yaitu :

- a. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerakan masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesejahteraan nasional, pertahanan keamanan.
- b. Menyelenggarakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain.
(Nugroho Notosusanto, 1983 ; 108)

Pada mulanya sebagai anggota Front Nasional adalah warga negara yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menyetujui dasar dan tujuan Front Nasional, baik itu yang tergabung dalam organisasi Golongan Karya atau golongan fungsional. Yang tergabung dalam Front Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Golongan buruh dan pegawai
- b. Golongan tani
- c. Golongan pengusaha nasional
- d. Golongan Bersenjata
 - (1) Angkatan Darat
 - (2) Angkatan Laut
 - (3) Angkatan Udara
 - (4) Polisi
 - (5) Veteran
- e. Golongan Alim ulama
 - (1) Agama Islam
 - (2) Agama Kristen Protestan
 - (3) Agama Katolik

- (4) Agama Hindu
 - f. Angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945
 - g. Angkatan Jasa
 - (1) Cendekiawan
 - (2) Guru dan Pendidik
 - (3) Seniman
 - (4) Usahawan
 - (5) Daerah
 - (6) Pemuda
 - (7) Wanita
 - (8) Warga negara peranakan
- (Nugroho Notosusanto, 1983 ; 108-109)

3.5 Pembentukan DPR-GR

Presiden Sukarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960.(Depdikbud, 1975 ; 165).

DPR-GR yang menggantikan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 ini sangat menguntungkan golongan nasionalis dan golongan komunis. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan komposisi yang terdapat dalam DPR-GR.

Menilik afilasinya, maka perimbangan suara golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis adalah $44+50=94$, $43+24=67$ dan $30+51=81$. Padahal dalam DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 perbandingan kursi untuk Nasionalis, Islam dan Komunis adalah 65:115:42.
(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 313)

Tugas DPR-GR ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Sukarno pada saat upacara pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 yaitu ‘melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan

melaksanakan Demokrasi Terpimpin.(Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 313).

DPR-GR yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ini diatas berbeda sekali dengan badan legislatif sebelumnya. Tidak hanya oleh karena dia bekerja dalam suatu sistim pemerintahan yang lain, akan tetapi juga oleh karena dia bekerja dalam suasana dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintahan. (Miriam Budiardjo, 1989; 193).

Sebagai badan legislatif pada masa Demokrasi Terpimpin DPR-GR ternyata mempunyai banyak sekali kelemahan-kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo sebagai berikut :

Kelemahan DPR-GR dibidang legislatif adalah bahwa DPR-GR kurang sekali menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR-GR membiarkan badan eksekutif mengadakan Penetapan-Penetapan Presiden atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru. Padahal, Dekrit sekedar untuk menuntun langkah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sesudah itu semua perundang-undangan seharusnya berdasarkan langsung pada Undang-Undang Dasar 1945. Lagipula banyak keputusan penting (seperti pengguntungan uang, politik konfrontasi, pengambilalihan perkebunan dan perusahaan asing, dan sebagainya) diputuskan di luar DPR-GR. (Miriam Budiardjo, 1989 ; 193).

B. Pembahasan

1. Usaha-Usaha Pemerintah Di Bidang Kelembagaan Dalam Memantapkan Ketahanan Nasional Di Indonesia Tahun 1959-1965.

Berdasarkan Data yang diperoleh, untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin dan dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan melindungi

Dasar Negara Indonesia, maka pemerintah melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan Dasar Negara di bidang kelembagaan terhadap situasi politik di Indonesia, antara lain yaitu :

1.1 Pembentukan Kabinet

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk memantapkan usaha-usaha pemerintah dalam mempertahankan dasar negara dan pelaksanaan Demokrasi terpimpin, maka pemerintah harus dilengkapi dengan beberapa lembaga yang diperlukan. Salah satunya yaitu pembentukan kabinet. Pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat lima kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet Kerja I. Pada Kabinet Kerja I ini Pemerintah berhasil mengeluarkan Manifesto politik yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dan pada Kabinet Kerja I ini juga Presiden Sukarno melakukan penyederhanaan terhadap partai-partai politik yang bertujuan agar persaingan-persaingan yang terjadi antar partai politik yang membuat mereka melalaikan kewajiban membangun negara tidak terjadi lagi pada Demokrasi Terpimpin. Kedua langkah tersebut membuat situasi politik di Indonesia semakin membail dan hal ini membuat ketahanan nasional pun semakin mantap. Pada Kabinet Kerja I ini kekuasaan Presiden Sukarno tampak begitu besar, karena selain menjabat sebagai Kepala Negara Presiden Sukarno juga menjabat sebagai Perdana Menteri sehingga dengan mudah melakukan tindakan yang dikehendakinya.

Kabinet Kerja I kemudian digantikan dengan Kabinet Kerja II. Presiden Sukarno pada Kabinet Kerja II ini masih juga menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus

Perdana Menteri. Program Kabinet Kerja II sangat sederhana yaitu melanjutkan program Kabinet Kerja I. Untuk melanjutkan program tersebut mengalami kesulitan karena masih adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri seperti DI/TII dan Permesta. Pada Kabinet Kerja II ini pemerintah melanjutkan kembali usaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena merupakan suatu tuntutan nasional. Tuntutan itu didasarkan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “ Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sedangkan Irian Barat adalah wilayah mutlak dari bangsa Indonesia. Usaha ini pun mengalami keberhasilan yakni dengan disepakatinya perjanjian New York antara pihak Belanda dan Indonesia yang ditengahi oleh pihak Amerika yang hasilnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (PBB). Pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia sudah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan bebas dari penjajahan asing dan ketahanan nasional di Indonesia. Pun semakin mantap. Kemudian Presiden Sukarno melakukan reshuffle kabinet sehingga Kabinet Kerja II jatuh dan digantikan oleh Kabinet Kerja III.

Pada masa Kabinet Kerja III ini dalam bidang keamanan mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari dapat ditumpasnya pemberontakan-pemberontakan di Indonesia seperti PRRI, DI/TII dan Permesta, yang dapat ditumpas melalui

operasi keamanan yang intensif dan terpadu. Dengan dapat ditumpasnya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, membuat bangsa Indonesia mulai bersatu kembali melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dan membuat semakin mantapnya ketahanan Nasional.

Presiden Sukarno kemudian membentuk Kabinet Kerja IV. Program Kabinet Kerja IV ini sedikit berbeda dengan program Kabinet Kerja III, pada Kabinet Kerja IV ini terdapat program pengganyangan Malaysia. Program pengganyangan Malaysia ini dimaksudkan untuk menggagalkan Federasi Malaysia yang dianggap Presiden Sukarno sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris, dan akan membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai dan agar ketahanan nasional Indonesia masih tetap terjaga.

Kemudian dengan adanya reshuffle kabinet pada tanggal 27 Agustus 1964 melahirkan kabinet baru yaitu Kabinet Dwi Kora yang menggantikan Kabinet Kerja IV. Kabinet kerja ini dibentuk bertujuan untuk memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan juga untuk menggagalkan negara boneka Malaya buatan nekolim Inggris.

1.2 Pembentukan MPRS dan DPAS

Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden maka dibentuklah MPRS sebelum pembentukan MPR yang sesuai dengan UUD 1945.

Keanggotaan MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Sukarno dengan beberapa syarat salah satunya setuju dengan Manifesto Politik. Presiden juga kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. MPRS dalam sidang nya menghasilkan beberapa ketetapan yakni Ketetapan MPRS No I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN dan Ketetapan No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip musyawarah dan mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga permusyawaratan, perwakilan. Yang membuat Situasi politik di Indonesia semakin stabil dan Ketahanan Nasional pun semakin mengalami kemantapan juga.

1.3 Penetapan GBHN

Berdasarkan data yang diperoleh untuk melaksanakan Tripogram Kabinet Kerja diperlukan juga adanya pedoman yang merupakan haluan negara. Namun pada saat itu Indonesia belum memiliki GBHN untuk dijadikan pedoman pembangunan. Sehingga pada saat memperingati Hari Proklamasi yang ke- 14 pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno menyampaikan pidato yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol.

Kemudian pada sidang di Bandung MPRS menerima dan mengukuhkan Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya GBHN ini pemerintah menyusun politik dan strategi dalam bidang politik, strategi dalam bidang ekonomi, strategi dibidang sosial budaya dan strategi di bidang hankam, sebagai pedoman dan pegangan aparatur pemerintahan untuk segenap aspek

kehidupan nasional. Hal ini membuat berjalannya dan berhasilnya Triprogram Kabinet Kerja dan pembangunan yang ada, dan membuat ketahanan nasional pun semakin terjamin kemantapannya.

1.4 Pembentukan Front Nasional

Berdasarkan data yang diperoleh untuk mewujudkan suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi maka dibentuklah Front Nasional. Pada mulanya anggota Front Nasional ini terdiri dari seluruh warga negara Indonesia yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun dalam perkembangan Front Nasional juga berasal dari partai politik termasuk di dalamnya Partai Komunis Indonesia. Front Nasional yang dibentuk untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional itu pun semakin memantapkan ketahanan nasional di Indonesia.

1.5 Pembentukan DPR-GR

Berdasarkan data yang diperoleh bulan Juni 1960 terjadi peristiwa menarik didalam pemerintahan Indonesia. Pada waktu pemerintah mengajukan anggaran belanja kepada DPR, ternyata DPR menolak anggaran belanja yang diajukan oleh pemerintah tersebut. Akibat penolakan tersebut, adalah pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum 1955 oleh Presiden Sukarno.

Setelah membubarkan DPR, Presiden Sukarno kemudian pada tanggal 24 Juni 1960 membentuk DPR baru yang disebut DPR Gotong Royong (DPR-GR).

Berfungsinya dan berhasilnya lembaga ini dalam tugas – tugasnya membuat situasi pemerintahan di Indonesia semakin mantap dan ketahanan nasional pun semakin mantap juga.

REFERENSI

Nugroho Notosusanto. 1983. *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan : Jakarta. Halaman 120-121.

Op. cit. Halaman 63.

Op. cit. Halaman 76.

Moedjanto, G. 1989. *Indonesia abad ke 20*. Kanisius : Yogyakarta. Halaman 114.

Nugroho Notosusanto. 1983. *Op. cit.* Halaman 102.

Op. cit. Halaman 98.

Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta. Halaman 207.

Sunggono, Bambang. 1992. *Partai Politik*. Bina Ilmu : Jakarta. Halaman 80.

Suprpto, Bibit. 1985. *Op. cit.* Halaman 219.

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 332.

Nugroho, Tjahyadi. 1985. *Suharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Yayasan Telapak : Semarang. Halaman 137.

Op. cit. Halaman 141.

Suprpto, Bibit. 1985. *Op. cit.* Halaman 227.

Nasution, A. H. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid VIV*. Gunung Agung: Jakarta. Halaman 342.

Op. cit. Halaman 343.

Presiden Sukarno. 1986. *Amanat Proklamasi IV 1961-1966*. Yayasan Sukarno. Halaman 78.

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Op. cit.* Halaman 357.

Op. cit. Halaman 358.

Ricklefs, M.C. 1989. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta. Halaman 414.

Suprpto, Bibit. 1985 . *Op. cit.* Halaman 265.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* : Jakarta. Halaman 64.

Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta. Halaman 262.

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Op. cit.* Halaman 358.

Op. cit. Halaman 316.

Nugroho Notosuanto. 1983. *Op. cit.*Halaman 108.

*Op. cit.*Halaman 108-109.

Depdikbud. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 165.

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Op. cit.* Halaman 313.

Budiardjo, Miriam. 1989. *Op. cit.* Halaman 193

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah di bidang kelembagaan dalam memantapkan ketahanan nasional tahun 1959-1965 yaitu :

1. Membentuk Kabinet Kerja (Kabinet Gotong Royong).

Pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat lima kali pergantian kabinet. Kabinet yang pada waktu itu dibentuk yaitu Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II, Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV dan Kabinet Dwi Kora. Kabinet Kerja ini mengalami keberhasilan yaitu dengan kembalinya Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat ditumpasnya pemberontakan-pemberontakan yang ada dan sesuai dengan UUD 1945.

2. Membentuk MPRS dan DPAS.

Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden maka dibentuklah MPRS sebelum pembentukan MPR yang sesuai dengan UUD 1945. Keanggotaan MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Sukarno dengan beberapa syarat salah satunya setuju dengan Manifesto Politik. Dalam beberapa sidangnya MPRS menghasilkan beberapa ketetapan, dan ketetapan-ketetapan itu membuat ketahanan nasional pun semakin mantap.

3. Penetapan GBHN.

Untuk melaksanakan Triprogram Kabinet Kerja diperlukan juga adanya pedoman yang merupakan haluan negara. Namun pada saat itu Indonesia belum memiliki GBHN untuk dijadikan pedoman pembangunan. Maka dibentuklah GBHN yang berlandaskan Manifesto Politik hasil pidato Presiden Sukarno.

4. Membentuk Front Nasional.

Untuk mewujudkan suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi maka dibentuklah Front Nasional. Anggota Front Nasional ini terdiri dari seluruh warga negara Indonesia yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Front Nasional ini bertujuan untuk memantapkan ketahanan nasional.

5. Membentuk DPR-GR.

Setelah membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955, Presiden Sukarno kemudian pada tanggal 24 Juni 1960 membentuk DPR baru yang disebut DPR Gotong Royong (DPR-GR). Semua anggota DPR-GR itu adalah hasil penunjukan presiden.

Dengan pelaksanaan program kerja dari Kabinet Kerja dan ditunjukkannya keberhasilan dan berfungsinya lembaga-lembaga seperti MPRS, DPAS dan DPR-GR dalam tugasnya hal ini membuat situasi pemerintah dan ketahanan nasional di Indonesia semakin mantap.

5.2 Saran

Demi Kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia , kita sebagai bagian dari bangsa Republik Indonesia harus terus berusaha mempertahankan Dasar Negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945 guna memantapkan Ketahanan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsia, Tontowi. 2008. *Perspektif Kewiraan dalam Ketahanan Nasional*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. 122 halaman.
- Anwar, Rosihan. 1981. *Sebelum Prahara*. Sinar Harapan : Jakarta. 556 halaman.
- _____. Ahmaddani G. Martha dan Christanto Wibisono. 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Perjuangan Bangsa*. Proyek Pengembangan dan Pengendalian/ Kebijakanaksanaan dan Program Generasi Muda: Jakarta. 330 halaman.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta : Jakarta. 314 halaman.
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta. 252 halaman.
- Depdikbud. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 252 halaman.
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka: Jakarta. 660 halaman.
- Fernandes, Frans S. 1988. *Hubungan Internasional Dan Peran Bangsa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* : Jakarta. 246 halaman.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta. 506 halaman.
- Moedjanto, G. 1989. *Indonesia abad ke 20*. Kanisius : Yogyakarta. 660 halaman.
- Muhaimin. Yahya A.. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta. 245 halaman.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada university Press : Yogyakarta. 185 halaman.
- Notosusanto, Nugroho. 1983. *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan : Jakarta. 413 halaman.

- _____. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Inti Dayu: Jakarta. 84 halaman.
- _____. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional*. Balai Pustaka : Jakarta. 187 halaman.
- Presiden Sukarno. 1986. *Amanat Proklamasi IV 1961-1966*. Yayasan Sukarno. 257 halaman.
- Ricklefs, M.C. 1989. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta. 501 halaman.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar metodologi Riset*. Fajar Agung: Jakarta. 150 halaman.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* : Jakarta. 118 halaman.
- Sunggono, Bambang. 1992. *Partai Politik*. Bina Ilmu : Jakarta. 252 halaman.
- Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 398 halaman.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung. 338 halaman.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara: Jakarta. 222 halaman.
- Yusmar Basri, dan Nugroho Notosusanto. 1978. *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMP*. Timbul : Jakarta. 184 halaman.

